

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara yang sedang berkembang ini, anggota masyarakat menginginkan kemakmuran secara material dan spiritual yang berarti bahwa setiap kebutuhan ataupun keinginan dapat terpenuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai berbagai kegiatan untuk diterapkan yang dalam pelaksanaannya memerlukan barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk uang. Adanya penggunaan uang dalam melaksanakan fungsi pemerintah inilah disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam konteks ekonomi makro merupakan salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) serta pengeluaran sektor luar negeri yang digunakan untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan (Dumairy, 2006):

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (1.1)$$

Adanya pengeluaran pemerintah di Indonesia dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan setiap tahun dan telah direncanakan terlebih dahulu. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Setiap fungsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan kebijakan fiskal melalui kebijakan

pengeluaran atau belanja pemerintah. Dalam penelitian terdahulu, kebijakan belanja atau pengeluaran pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara skala nasional maupun daerah.

Besarnya pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak pada tingkat pengeluaran pemerintah. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji secara umum. Sehingga untuk mengetahui keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro, 2004). Dari adanya kesenjangan pendapatan akan berpengaruh pada perilaku konsumsi baik perilaku konsumsi oleh rumah tangga, individu, maupun perusahaan.

Nanga (2001) menyebutkan bahwa Nicholas Kaldor mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi yaitu pendapatan, selera, faktor sosial budaya, kekayaan, utang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, kredit, *money illusion*, distribusi, umur, letak geografis, dan distribusi pendapatan. Mankiw (2003) juga menjelaskan bahwa Keynes telah mengemukakan faktor pendapatan memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Dari adanya pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, hal ini disebut pengeluaran negara. Dalam pengeluaran negara baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan pengeluaran pemerintah untuk

subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang disediakan.

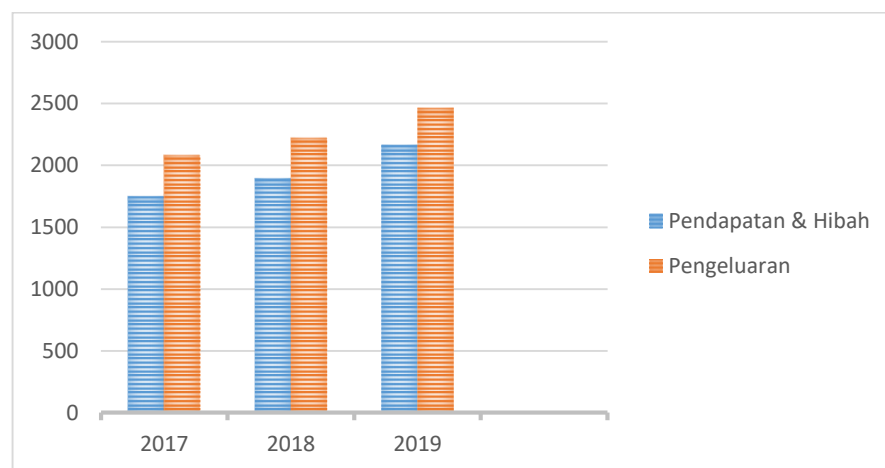
Selain itu, adanya subsidi juga dapat menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa yang lebih banyak lagi. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dari tahun 1988-2017 telah mengalami fluktuatif. Pada periode 1988-1996 rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,11% sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang terjadi laju pertumbuhan ekonomi sedang mengalami penurunan. Pada tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 4,92% namun menurun menjadi 3,64% melambat.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dengan membagi dana secara seimbang antara pusat dan daerah. Terdapat beberapa aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan belanja pemerintah yang membahas antara lain (Rosen, 1999): (1) pengeluaran pemerintah (2) sumber-sumber penerimaan pemerintah dengan pajak sebagai sumber penerimaan terpenting (3) pinjaman pemerintah dan perlunasannya (4) administrasi fiskal dan teknis fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara (5) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (6) kebijakan fiskal yang mempelajari peran dan pengaruh keuangan pemerintah pada pendapatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, harga-harga, dan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam reformasi bergulir saat ini, adanya

otonomi daerah semakin digencarkan dan kini mengusung tema revolusi mental dengan tujuan semakin terbuka lebar kesempatan penduduk daerah dalam berkompetisi untuk menuju kesejahteraan bersama. Dalam Pasal 23 ayat 1 UUD Tahun 1945 berbunyi bahwasannya:

Ayat (1) “...Pendanaan pembangunan dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senantiasa ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan”.

Berikut ditunjukkan grafik Anggaran Pendapatan Belanja Negara :

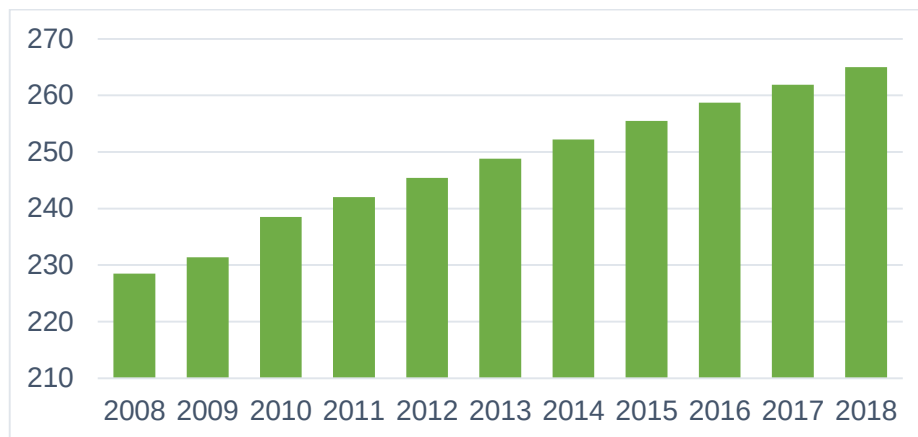


Gambar 1.1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Miliar)

Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah) Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menggambarkan bahwa adanya pendapatan negara yang terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp 2.165.112.000 begitu juga pengeluaran yang terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar Rp 2.461.112.000. Berdasarkan jumlah pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi tersebut, Indonesia juga didominasi dengan adanya kepadatan penduduk sebagai berikut:



Gambar 1.2

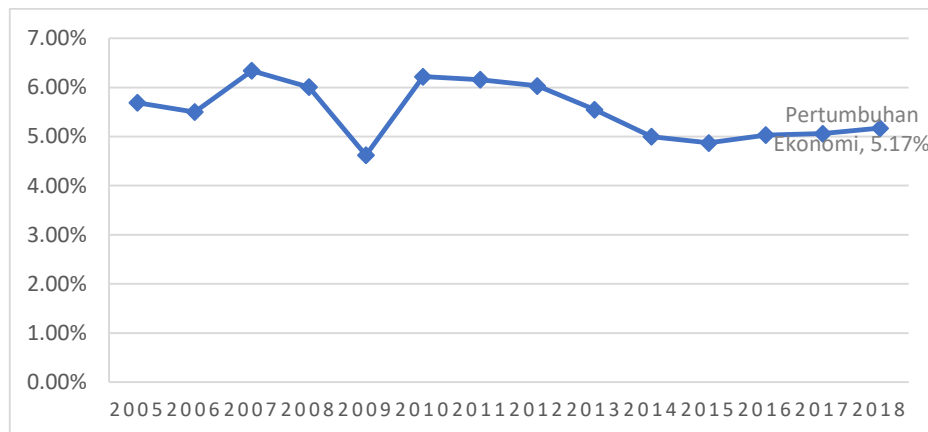
Jumlah Penduduk Di Indonesia (Juta Jiwa)

Sumber: BPS Indonesia (data diolah) Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 228 jiwa menjadi 231 jiwa pada tahun 2009 hingga di tahun 2018 telah mengalami peningkatan menjadi 265 jiwa. Dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang disebutkan oleh Brata (dalam Ginting, 2008). Telah disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu determinan pembangunan manusia di Indonesia. Bahwa dalam era otonomi, pemerintah harus lebih mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat sehingga pengeluaran pemerintah ini menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam mendorong pembangunan ekonomi, juga perlu memperhatikan besar kecilnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung dengan adanya data

Worldbank (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2005-2018 mengalami fluktuatif. Ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.3

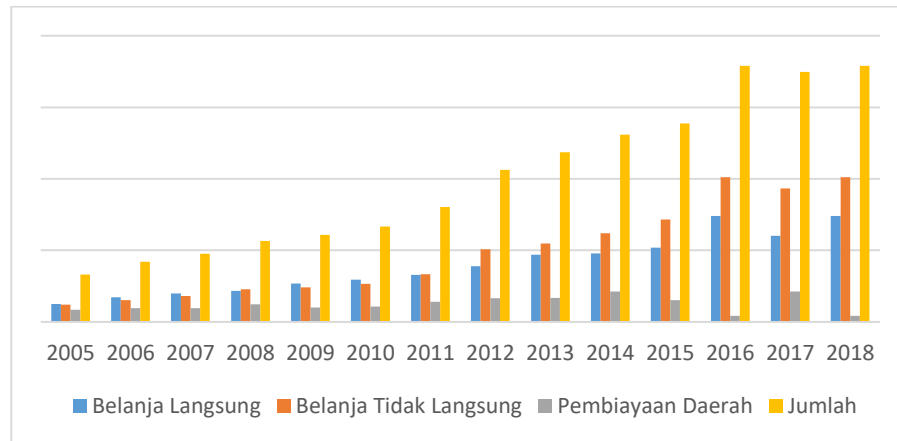
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Persen)

Sumber: WorldBank (data diolah) Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.3 di atas menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2015-2018 telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 4,9% meningkat menjadi 5,03% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 juga meningkat menjadi 5,06% sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,17%. Dari adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, berdasarkan data tersebut juga menggambarkan bahwa kinerja pembangunan Indonesia cukup tinggi. Sehingga hal ini perlu campur tangan dari peran pemerintah, masyarakat dan pelaku ekonomi. Dari pesatnya kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia juga telah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan tetapi juga dapat dilihat dari peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa publik. Besar kecilnya penyediaan fasilitas publik merupakan hasil dari adanya

pengeluaran pemerintah. Berikut grafik yang menunjukkan tinggi rendahnya realisasi pengeluaran pemerintah di Indonesia menurut jenis pengeluaran :



Gambar 1.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia
Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar)

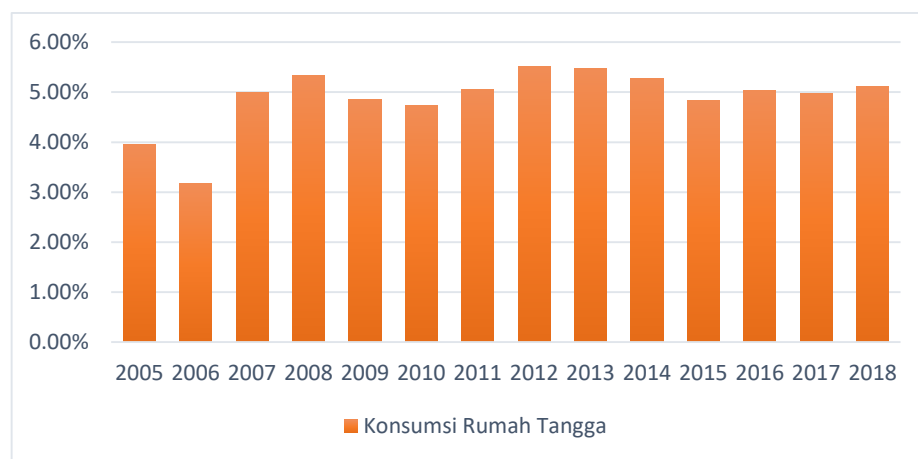
Sumber: BPS Indonesia (data diolah) Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung hingga pembiayaan daerah telah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Begitu juga untuk jumlah realisasi pengeluaran pemerintah di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar Rp 66.210.449.952 menjadi Rp 358.180.434.309. Kemudian pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah telah mengalami penurunan menjadi Rp 349.611.545.050 dan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 358.180.434.309 pada tahun 2018. Selain pengeluaran pemerintah yang merupakan pemasukan untuk pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga berkontribusi pada pendapatan nasional. Sukirno (2013) mengemukakan bahwa dalam jangka panjang pola konsumsi masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian bahwa pendapatan rumah tangga adalah faktor yang paling menentukan konsumsi energi rumah tangga di samping faktor non-

ekonomi lainnya seperti luas lantai rumah dan jumlah anggota rumah (Nazer dan Hasan, 2016). Begitu juga dengan penelitian lain yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan diikuti oleh meningkatnya konsumsi dengan mengikuti pola konsumsi jangka pendek (Kimin, 2002). Penelitian tersebut juga memperkuat penelitian Hani (2006) bahwa setiap terjadi kenaikan pendapatan akan menaikkan tingkat konsumsi rumah tangga. Selain itu, pada teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa tingkat konsumsi sekarang (*current consumption*) dipengaruhi oleh pendapatan sekarang (*current income*) dan tingkat suku bunga. Mankiw (2003) yang menjelaskan bahwa seseorang atau rumah tangga akan menambah konsumsinya ketika terjadi peningkatan pendapatan sekarang.

Teori tersebut didukung dengan adanya data konsumsi rumah tangga sebagai berikut:



Gambar 1.5

Konsumsi Rumah Tangga (Persen)

Sumber: *WorldBank* (data diolah) Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.5 di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2006, besarnya konsumsi rumah tangga sangat rendah yaitu sebesar 3,17% serta meningkat drastis menjadi 5% pada tahun 2007. Pada tahun 2017 – 2018

konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 5,13%. Hal ini menggambarkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat terus mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hubungan dari adanya pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dengan adanya laju konsumsi rumah tangga yang juga mengalami peningkatan serta memiliki peran dalam berkontribusi untuk pendapatan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kini hipotesis dari Barro-Ricardian dalam pengeluaran pemerintah bahwa konsumsi rumah tangga tidak terdapat keterkaitan dengan konsumsi pemerintah di Bangladesh. Sehingga hal ini menjadi perdebatan dalam masalah teori dan empiris karena sangat berpengaruh penting untuk merumuskan kebijakan fiskal. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan riset dengan judul **“Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia”**. Dengan harapan dapat memperoleh implementasi penelitian yang dapat diterapkan untuk perencanaan pembangunan mendatang di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang di atas, maka permasalahan ini yaitu bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan konsumsi rumah tangga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan konsumsi rumah tangga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi untuk pembelajaran mahasiswa ekonomi pembangunan khususnya.
- b. Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan di Universitas Trunojoyo Madura sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan untuk mengetahui kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan konsumsi rumah tangga di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.